

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini terdiri dari dua subbab, yakni subbab simpulan dan rekomendasi. Subbab simpulan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat (1950-1962)” ini. Sementara itu, subbab rekomendasi menyajikan saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan ini.

#### 5.1 Simpulan

Subbab ini menyajikan kesimpulan penulis atas hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab IV sebelumnya. Simpulan tersebut merupakan jawaban keseluruhan atas masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan demikian simpulan tersebut merujuk kepada jawaban-jawaban atas ketiga rumusan masalah yang diajukan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kondisi keamanan di wilayah Jawa Barat pada dekade 1950-an buruk. Hal tersebut karena pada waktu itu, Jawa Barat sedang mengalami masalah gangguan keamanan dalam negeri, salah satunya yang disebabkan oleh adanya masalah DI/TII Jawa Barat. Hal tersebut juga berhubungan dengan kondisi Indonesia pada waktu itu, yang mana sedang mengalami berbagai permasalahan yang berasal dalam negerinya sendiri, salah satunya masalah keamanan yang memburuk karena adanya masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di wilayah-wilayahnya.

Adanya masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri itu sendiri dipengaruhi oleh permasalahan lain yang terjadi di Indonesia pada waktu itu, salah satunya ketidakstabilan politik di Indonesia akibat diberlakukannya sistem parlementer ala Barat. Ketidakstabilan politik tersebut menyebabkan munculnya masalah-masalah lainnya. Dengan demikian, permasalahan yang dialami oleh Indonesia pada dekade 1950-an tersebut saling memengaruhi satu sama lain, salah satunya berpengaruh terhadap kondisi keamanan di Indonesia.

Masalah gangguan keamanan dalam negeri di wilayah Jawa Barat itu sendiri, yakni masalah DI/TII Jawa Barat sebenarnya telah terjadi sejak 1949. Namun, selama dekade 1950-an, masalah gangguan keamanan dalam negeri tersebut masih terus terjadi, bahkan baru dapat diselesaikan pada awal dekade 1960-an. Adanya masalah gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh masalah DI/TII Jawa Barat tersebut merupakan salah satu penyebab memburuknya kondisi keamanan di wilayah Jawa Barat pada waktu itu.

Oleh karena itu, selama dekade 1950-an, wilayah Jawa Barat hampir selalu berada dalam keadaan darurat (SOB)/keadaan bahaya dengan berbagai tingkatan. Keadaan darurat (SOB)/keadaan bahaya di wilayah Jawa Barat itu sendiri baru dapat dicabut pada 1963. Hal tersebut berhubungan dengan kondisi keamanan di wilayah tersebut yang dianggap sudah membaik, berhubungan dengan masalah DI/TII Jawa Barat yang sudah teratasi pada 1962.

Kedua, alasan Korps Mobile Brigade terlibat dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat adalah karena Korps Mobile Brigade, sebagai satuan milik Djawatan Kepolisian Negara (DKN), diperbantukan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), khususnya kepada Tentara Teritorium III/Siliwangi dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut. Keterlibatan Korps Mobile Brigade dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat bukan karena Djawatan Kepolisian Negara (DKN) menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut. Dalam tugas ini, Djawatan Kepolisian Negara (DKN) melalui Korps Mobile Brigadenya hanya ditugaskan untuk membantu Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), khususnya Tentara Teritorium III/Siliwangi yang menjadi penanggung jawab utama atas tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut.

Hal tersebut karena selama dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an, wilayah Jawa Barat selalu berada dalam keadaan darurat (SOB)/keadaan bahaya yang disebabkan oleh adanya gangguan keamanan dalam negeri luar biasa yang terjadi di wilayah tersebut pada waktu itu, yakni masalah DI/TII Jawa Barat

dengan gerombolan-gerombolan bersenjata. Oleh karena diberlakukannya keadaan darurat (SOB)/keadaan bahaya di wilayah Jawa Barat, maka urusan keamanan di wilayah tersebut menjadi tanggung jawab pihak militer, yakni Tentara Teritorium III/Siliwangi, sebagai pasukan angkatan perang yang berlokasi di Jawa Barat. Sementara itu, kedudukan Djawatan Kepolisian Negara (DKN) dalam urusan keamanan tersebut menjadi berada di bawah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Hal tersebut karena pada waktu itu, kepolisian negara dianggap belum mampu jika harus menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas tugas mengatasi gangguan keamanan dalam negeri luar biasa.

Dengan demikian, tugas untuk mengatasi gangguan keamanan luar biasa di wilayah Jawa Barat, yakni mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut menjadi tugas Tentara Teritorium III/Siliwangi. Operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat diselenggarakan oleh Tentara Teritorium III/Siliwangi. Dalam pelaksanaan tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, yakni dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri, Djawatan Kepolisian Negara (DKN) melalui pasukan-pasukan Korps Mobile Brigade diperbantukan kepada Tentara Teritorium III/Siliwangi. Dengan demikian, dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, Korps Mobile Brigade berada di bawah komando Tentara Teritorium III/Siliwangi.

Alasan Korps Mobile Brigade menjadi satuan polisi yang digunakan untuk diperbantukan kepada Tentara Teritorium III/Siliwangi dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut adalah karena Korps Mobile Brigade merupakan satuan polisi yang paramiliter. Dengan demikian, Korps Mobile Brigade dianggap mampu untuk membantu angkatan perang dalam melakukan tugas mengatasi gangguan keamanan dalam negeri di wilayah Jawa Barat yang disebabkan oleh DI/TII Jawa Barat dan mampu untuk dikerahkan ke dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, bersama-sama dengan Tentara Teritorium III/Siliwangi di front depan.

Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade sebagai andilnya dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat adalah dengan membentuk Pasukan Ranger dan mengerahkan pasukan-pasukannya dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut. Pembentukan Pasukan Ranger tersebut termasuk upaya yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, karena Pasukan Ranger tersebut dibentuk sebagai respons dari Korps Mobile Brigade terhadap terjadinya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri di Indonesia selama dekade 1950-an, seperti masalah DI/TII Jawa Barat. Hal tersebut karena Korps Mobile Brigade hampir selalu dilibatkan dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri yang diselenggarakan untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut, salah satunya dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Dengan demikian, dibentuklah sebuah pasukan khusus dalam tubuh Korps Mobile Brigade itu sendiri yang memiliki kemampuan dan tugas khusus, sebagai pasukan dari kepolisian untuk digunakan dalam mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Pasukan Ranger dari Korps Mobile Brigade tersebut dilibatkan juga dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, meskipun pada awalnya masih berupa dalam rangka melaksanakan *test mission* saja.

Selain itu, upaya Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut juga dengan mengerahkan pasukan-pasukannya dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut yang diselenggarakan sejak 1950 sampai 1962. Dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, pasukan-pasukan Korps Mobile Brigade dikerahkan bersama-sama dengan pasukan-pasukan angkatan perang dari Tentara Teritorium III/Siliwang di front depan menghadapi pihak DI/TII Jawa Barat secara langsung. Pasukan-pasukan Korps Mobile Brigade yang dikerahkan dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut di antaranya adalah kompi-kompi Batalion Pengejar yang dikerahkan dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat di

Alia Widara Putri, 2021

**KORPS MOBILE BRIGADE DALAM MENGATASI MASALAH DI/TII JAWA BARAT (1950-1962)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Priangan Barat, yakni di daerah Bogor dan Cianjur pada 1952 dan kompi-kompi Pasukan Ranger yang dikerahkan dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat di Priangan Timur, yakni di daerah Tasikmalaya dan Garut sejak 1959. Keterlibatan Korps Mobile Brigade dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut dapat dibuktikan, salah satunya melalui adanya personel-personel Korps Mobile Brigade yang memperoleh penghargaan Satyalencana GOM V, yang merupakan penghargaan untuk seseorang yang terlibat dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat.

Dengan demikian, Korps Mobile Brigade bukan merupakan pemeran utama dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut. Sebagai satuan kepolisian, Korps Mobile Brigade hanya dilibatkan untuk membantu Tentara Teritorium III/Siliwangi dari Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan upaya-upaya mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Dengan demikian, andil Korps Mobile Brigade dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat adalah membantu Tentara Teritorium III/Siliwangi dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat sejak 1950 sampai 1962.

## **5.2 Rekomendasi**

Subbab ini menyajikan saran-saran yang dapat penulis sampaikan untuk beberapa pihak berdasarkan kepada penelitian ini. Saran-saran tersebut penulis sampaikan di antaranya untuk:

### **1. Peneliti Selanjutnya**

Saran ini penulis sampaikan untuk peneliti selanjutnya, khususnya untuk peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis dengan topik penelitian yang penulis lakukan. Kelemahan penelitian yang penulis lakukan ini, salah satunya adalah dalam hal penggunaan sumber sejarah primer. Dalam penelitian ini, penulis belum dapat menemukan cukup banyak arsip tentang Korps Mobile Brigade, terutama arsip yang benar-benar relevan tentang Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Dengan demikian, penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sejenis

dengan topik penelitian yang penulis lakukan ini, agar dapat mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah berupa arsip yang belum digunakan dalam penelitian ini.

Selain itu, penulis juga belum melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh Korps Mobile Brigade, khususnya yang terlibat dalam peristiwa penyelesaian terhadap masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, secara langsung. Maka dari itu, penulis juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mencari tokoh-tokoh dari Korps Mobile Brigade yang terlibat dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat pada dekade 1950-an tersebut dan melakukan wawancara secara langsung kepada mereka. Dengan dilakukannya wawancara terhadap tokoh-tokoh tersebut, diharapkan akan diperoleh gambaran di lapangan yang lebih detail mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Hal tersebut karena deskripsi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat yang dideskripsikan dalam penelitian ini masih terlalu umum.

Kemudian, mengingat karena topik penelitian mengenai sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan/atau mengenai Korps Brigade Mobil (Brimob) ini masih belum banyak dituliskan, termasuk di lingkungan Program Studi Pendidikan Sejarah UPI itu sendiri. Dengan demikian, penulis juga hendak merekomendasikan topik-topik penelitian yang kiranya dapat dikembangkan dari topik penelitian yang telah penulis lakukan ini, di antaranya: pertama, mengenai andil Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah gangguan keamanan dalam negeri lainnya yang terjadi pada dekade 1950-an dan/atau dekade 1960-an, seperti dalam mengatasi masalah APRA, RMS, DI/TII Sulawesi dan Aceh, serta PRRI/Permesta, bahkan dalam peristiwa lainnya, seperti dalam operasi Trikora dan Dwikora. Kedua, mengenai Pasukan Ranger atau Pasukan Pelopor, sebagai pasukan khusus dalam Korps Mobile Brigade, misalnya dalam hal peranannya, perkembangannya, dsb. Ketiga, mengenai peranan dari tokoh-tokoh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya peranan dari tokoh-tokoh

Korps Mobile Brigade itu sendiri, seperti Moehammad Jasin, Anton Soedjarwo, Soetrisno Ilham, dll.

## 2. Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Penulis hendak merekomendasikan agar kurikulum pembelajaran sejarah Indonesia, termasuk dalam buku teks pembelajaran sejarah Indonesia, memasukan pembahasan dan tulisan mengenai sejarah dan/atau peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk peranan Korps Brigade Mobil (Brimob) tersebut di dalamnya. Misalnya, pada kompetensi dasar “Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa” dalam kurikulum pembelajaran sejarah dan pada bab “Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa” dalam buku paket sejarah Indonesia kelas XII, agar memasukan pembahasan dan tulisan mengenai peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk juga Korps Brigade Mobil (Brimob) dalam upaya mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia sehingga peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk peranan Korps Brigade Mobil (Brimob) dalam sejarah Indonesia dapat lebih dikenal.

## 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Saran ini penulis sampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya kepada unsur pendukungnya, yakni Pusat Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusjarah Polri). Diharapkan agar lebih banyak menyediakan buku-buku mengenai sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk sejarah Korps Brigade Mobil (Brimob), yang dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, apabila terdapat peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk sejarah Korps Brigade Mobil (Brimob), mereka dapat memperoleh sumber-sumber relevan dengan mudah.